



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM
MENERIMA**

**AUDIENSI PERSATUAN PERANGKAT DESA REPUBLIK INDONESIA
SELASA, 15 MEI 2018**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Audiensi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 15 Mei 2018
Waktu	: Pukul 13.10 WIB – 13.45 WIB
Tempat	: Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Gedung Nusantara III DPR RI lt. 3
Acara	: Menerima Audiensi Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia
Pimpinan Pertemuan	: Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	: Isnur Purwanto, S.I.P., M.M. Kabag Set. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	: Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia Berikut daftar nama terlampir

A. Pendahuluan

Pada hari Selasa, 15 Mei 2018 pukul 13.10 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia.

B. Pokok-Pokok Pembicaraan

1. Meminta kesejahteraan untuk Perangkat Desa dengan meminta gaji setara Gol. II.
2. Peraturan Undang-undang yang belum berpihak ke Perangkat Desa salah satunya tunjangan serta Plt. Sekertariat Desa.
3. Perubahan PP 43 Tahun 2014 menjadi PP 47 Tahun 2015 yang menjadikan permainan anggaran di Desa sehingga melemahnya perkembangan Desa.
4. PPDRI memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam untuk mengubah peraturan bahwa Plt. SekDes haursnya mengambil dari Perangkat Desa bukan dari PNS.
5. PPDRI memohon kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam bahwa Perangkat Desa dijadikan Purna Bakti seusai masa kerjanya.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 dan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Desa, bahwa khususnya untuk kebutuhan yang penting segera di Transfer ke Desa oleh pihak Kabupaten supaya Perangkat Desa ini bisa menjalankan kewajibannya.

C. Penutup

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan mendukung upaya status Perangkat Desa dengan Gol. II Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga diharapkan mendapatkan jaminan kesejahteraan.
2. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan dalam penyetaraan ini Perangkat Desa paling terdepan dalam memberikan pelayanan kepada publik dan Perangkat Desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
3. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menambahkan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur Tentang Desa dirasa tidak berpihak kepada kebutuhan Perangkat Desa, karena masih melekatnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan penyimpangan yang terjadi di setiap desa merupakan tidak transparannya anggaran yang dikelola, perlu evaluasi yang komprehensif untuk memajukan Indonesia dari pinggir melalui desa.

Audiensi ditutup pukul 13.45 WIB.

**a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat**



Isnu Purwanto, S.I.P., M.M.
NIP. 19620313 198203 1 001